

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Pasca berakhirnya perang dingin arah hubungan internasional perlahan mulai berubah. Sejak era itu pula terjadi perubahan signifikan dalam kajian ilmu hubungan internasional. Isu ideologi yang dulunya menjadi kajian utama mulai bergeser ke topik – topik baru seperti Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan, kerja sama ekonomi, isu gender dan sebagainya.¹ Isu – isu kerjasama sendiri mulai menguat dikarenakan negara mulai sadar akan pentingnya posisi negara lain, bukan lagi sebagai lawan tetapi sebagai rekan yang potensial untuk mencapai national interest secara bersamaan.

Kedaaan yang saat ini dapat dilihat di dunia internasional adalah semakin banyaknya kerjasama maupun perjanjian luar negeri yang dilakukan oleh negara ataupun aktor internasional lain. Mulai dari kerjasama politik, kemanan hingga keekonomian. Hal ini searah seperti yang telah di jelaskan teori – teori realis bahwa negara akan selalu mengusahakan agar national interestnya tercapai ini Karena sifat dunia internasional adalah anarki dimana tidak ada satupun kekuasaan setinggi negara, sehingga banyak cara akan di tempuh meski dengan cara paksaan ataupun kerjasama.² Dewasa ini banyak negara melakukan perdagangan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhanya sendiri, termasuk yang dilakukan Indonesia dan

¹ Ministry for foreign affair Japan, “Diplomatic Bluebook”, di akses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1975/1975-1-1.html>, pada tanggal 10 oktober 2016 pada pukul 20.00 wib

² Morgenthau and Thompson, Politics among nations : the struggle for power and peace, (NewYork, McGraw-Hill, 1993)

jepang hal ini dilakukan karena negara sadar bahwa mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara juga melakukan kerjasama penanaman modal atau investasi. Investasi asing banyak dilakukan oleh negara – negara berkembang sebagai alat untuk mendapatkan modal pembangunan secara instan.

Kerjasama juga banyak dilakukan Indonesia dengan negara jepang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mulai dari kerjasama di bidang politik, ekonomi, serta budaya, tetapi yang paling mencolok didalam hubungan Indonesia dengan jepang adalah hubungannya dibidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi ini juga terjadi di beberapa sektor, yaitu perdagangan dan investasi. Kerjasama perdagangan dapat dilihat dari banyaknya brand jepang yang beredar di Indonesia. Sementara kerjasama di bidang investasi dapat terlihat dari banyaknya pabrik – pabrik jepang hingga infrastruktur yang banyak dibangun dengan kerjasama investasi antara pemerintah jepang dan Indonesia.

Indonesia dan jepang pada tahun 2011 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani perjanjian investasi dengan jepang, yaitu dalam bidang energy dalam pembangunan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap di kabupaten Batang Jawa Tengah. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya akan sangat membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan dalam negeri seperti pembangunan PLTU ini. Presiden sempat meminta Jepang untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, demi menjaga hubungan Indonesia – Jepang serta mempercepat pembangunan di Indonesia terutama di bidang

infrastruktur dan manufaktur.³ Tentunya hal ini menjadi hal yang menjanjikan dimana jika mengingat pada masalah kerjasama Indonesia dan Jepang seringkali berakhir dengan keberhasilan dan membawa untung kepada kedua belah pihak.

Wacana investasi Jepang sebenarnya sudah mulai berjalan sejak awal tahun 2011 dengan adanya rencana mega proyek pembangunan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap di kabupaten Batang Jawa Tengah. Proyek ini terus dibahas oleh kedua negara, proyek besar ini direncanakan mampu untuk membuat daya sebesar 2 x 1000 megawatts di tanah seluas 226 hektar.⁴ Proyek ini didanai oleh JBIC (Japan Bank for International Cooperation) sekitar 50 triliun, sementara sisanya didanai oleh MNC Jepang J-power dan Itochu sebesar 5,8 triliun. Diharapkan PLTU ini dapat memenuhi kebutuhan listrik Jawa dan Bali, selain itu investasi ini juga memiliki arti penting bagi nama Indonesia di dunia internasional dalam kaitannya dengan nama Indonesia terlebih lagi ini merupakan pembangunan PLTU terbesar di ASEAN.

Dalam investasi pembangunan PLTU ini peran pemerintah Jepang melalui JBIC serta MNC nya tentu sangatlah besar karena mereka sebagai penyedia dana pembangunan. Tetapi sebagai investor, pihak Jepang juga bergantung dengan peran pemerintah Indonesia sebagai penyedia sarana investasi. Di sisi lain, pemerintah

³ Denny S, "Jokowi Ingin Jepang Tingkatkan Investasi Manufaktur di RI" di akses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2373153/jokowi-ingin-jepang-tingkatkan-investasi-manufaktur-di-ri> di akses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 21.00

⁴ Tazaki, "Project Finance and Political-Risk Guarantee for Central Java Coal-Fired Power Generation Project in Indonesia" di akses dari <https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2016/0603-48595> pada tanggal 11 oktober 2016 pukul 08.00

jepang dan Indonesia berhadapan dengan warga masyarakat sekitar yang menolak dibangunnya PLTU Karena menganggap investasi ini sama saja membunuh masyarakat sekitar secara perlahan, hal ini juga di dukung oleh NGO Greenpeace yang terus menyuarakan untuk di hentikanya investasi ini. Hal ini tentu membuat pemerintah jepang kembali meragukan kesuksesan investasi ini, sehingga sempat beberapa kali ingin menghentikan proses investasi ini.

Melakukan investasi di suatu negara memang tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Sering kali ditemukan hambatan – hambatan yang kadang memperlambat sebuah investasi, atau bahkan membuat sebuah investasi berhenti maupun tertunda. Dalam kasus investasi pembangunan PLTU di kabupaten batang, hambatan investasi ini dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan dari dalam (internal) dan hambatan dari luar (eksternal). Hambatan internal dari pembangunan PLTU ini adalah adanya perlawanan dari masyarakat yang menganggap pembangunan PLTU ini dapat merusak lingkungan serta mengancam mata pencaharian mereka, hal ini di dukung oleh Greenpeace yang menyerukan untuk di hentikanya investasi pembangunan PLTU tersebut. Serta hambatan dari luar sendiri berasal dari pemerintah jepang yang masih ragu akan kesiapan Indonesia dalam menerima investasi, dan khawatir investasi ini tidak memiliki prospek yang bagus di masa mendatang.

Sementara hambatan eksternal justru datang dari pemerintah jepang yang ragu akan kesiapan Indonesia. Hal ini di tengarai adanya intervensi yang dilakukan greenpeace. Kita semua tahu bahwa greenpeace mempunyai jaringan yang luas di seluruh dunia, sehingga tidak sulit untuk berkoordinasi untuk melakukan penolakan

terhadap PLTU ini, terlebih greenpeace di Jepang juga seide dengan greenpeace di Indonesia dalam penolakan PLTU ini. Sehingga pada ahirnya greenpeace menekan pemerintah jepang agar proyek PLTU ini segera di batalkan.

Berdasarkan paparan di atas skripsi akan mengulas lebih dalam tentang upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi investasi luar negeri dalam kasus pembangunan PLTU Batang. Maka didapat sebuah judul skirpsi **“Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Hambatan Investasi Jepang dalam Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang 2011-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas di atas maka dalam skripsi ini akan dibahas, “Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi hambatan investasi Jepang pada pembangunan PLTU Kabupaten Batang?”.

C. Tujuan Penelitian

Tulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini tentu yang pertama ditujukan kepada kalangan pesetudi Hubungan Internasional.
2. Memperkaya khasanah literatur Hubungan Internasional.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah yang sama.
4. Sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
5. Sebagai referensi untuk mengkaji kebijakan – kebijakan tentang investasi di Indonesia.

D. Landasan Teori

Landasan teori bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan dibantu oleh pemikiran - pemikiran ahli ilmu Hubungan Internasional. Selain itu dijelaskan pula konsep – konsep yang dipakai dalam skripsi ini, dengan harapan mendapatkan hasil yang ilmiah dan akademis.

Teori sendiri merupakan suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang sedang terjadi, menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi serta meramalkan kemungkinan terulangnya hal tersebut di masa mendatang.⁵ Jadi dalam skripsi ini akan dipergunakan teori – teori untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Lebih spesifik lagi teori – teori yang akan dipergunakan untuk membantu menjawab bagaimana upaya pemerintah Indonesia agar investasi dari jepang tetap bisa masuk ke kabupaten batang dan proyek pembangunan ini agar terus berjalan.

Didalam skripsi ini akan menggunakan beberapa konsep – konsep yang masih ada hubungannya dengan ilmu hubungan internasional serta utamanya dengan kasus ini. Konsep sendiri di artikan sebagai sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan, bisa juga di katakana sebagai penyederhanaan kenyataan yang kompleks dengan menggunakan kata – kata yang lebih muda dipahami.⁶

⁵ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Yogyakarta, LP3ES, 1990) hlm. 185

⁶ Ibid 94

D.1 Konsep Diplomasi

Sedikit kembali mengulas mengenai pengertian diplomasi menurut Nicholson merupakan bahasa serapan dari bahasa Yunani yaitu “diploun” dimana memiliki arti melipat. Hal ini merujuk pada dokumen – dokumen pada masa kekaisaran romawi yang terbuat dari logam serta dijahit lalu di tumpuk dan dilipat. Akhirnya kata – kata diplomasi pun berkembang hingga saat ini dan dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional, dan yang mengaturnya disebut diplomat.

Diplomasi sendiri memiliki banyak defisinisi, masing – masing ahli memiliki definisi yang berbeda mengenai diplomasi. Salah satunya adalah Harold Nicholson, Harold Nicholson menjelaskan bahwa diplomasi merupakan sebuah manajemen atau pengaturan hubungan internasional yang dilakukan melalui negosiasi yang dilaksanakan oleh diplomat.⁷ Berbeda halnya dengan KM Panikkar, dalam buku yang ia tulis yaitu *the principle and practice of diplomacy* menjelaskan diplomasi, dalam hubungan dengan politik internasional adalah sebuah seni demi mencapai kepentingan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain.⁸ Dari beberap pengertian tersebut dapat di Tarik kesimpulan bahwa diplomasi memiliki arti segala daya dan upaya secara damai yang dilakukan diplomat dengan cara bernegosiasi untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.

Pemahaman tentang diplomasi pada awalnya hanya berkaitan pada masalah antar negara saja. Tetapi pada era modern saat ini diplomasi juga

⁷ S.L Roy, *Diplomasi*, PT Raharga grafindo persada, Jakarta, 1995, hlm. 3

⁸ *Ibid.* hlm. 3

digunakan untuk melakukan hubungan dengan suatu kelompok masyarakat transnasional, perusahaan – perusahaan multi nasional. Dimana fungsi utama dari diplomasi yaitu negosiasi dipakai untuk mencapai kepentingan – kepentingan kelompok ataupun suatu perusahaan. Dalam bab ini akan di jelaskan dua konsep diplomasi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kepentingannya, dan dua konsep diplomasi itu adalah soft diplomacy dan public diplomacy yang akan dijelaskan sebagai berikut.

D.2 Summit Diplomacy

banyak cara dilakukan negara untuk mencapai national interestnya, dengan salah satunya adalah menggunakan cara diplomasi. Dimana dengan cara ini maka resiko perang dapat dikurangi bahkan dihilangkan, karena resiko perang akan mengakibatkan banyak kerugian dan resiko tidak tercapainya national interest.

Istilah summit diplomacy atau diplomasi summit pertama kali diutarakan oleh Winston Churchill ketika sebuah konferensi tingkat tinggi antara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet diadakan pada 1955⁹. Jika di telaah secara bahasa summit diplomacy bisa di artikan sebagai diplomasi yang dilakukan dengan cara summit atau dengan cara pertemuan. Pertemuannya pun dilakukan dengan langsung tatap muka oleh presiden atau kepala negara tanpa melewati perantara atau menteri yang terkait dalam permasalahan yang sedang di perbincangkan.

Menurut Elmer Plisckhe summit diplomacy merupakan suatu konferensi tingkat tinggi yang dilakukan antar kepala negara guna memajemen hubungan

⁹ Weilemann, Peter R. 2000. *The Summit Meeting: The Role and Agenda of Diplomacy at its Highest Level*. Ann Arbor: Macmillan Press.

antar negara sekaligus menentukan dan mempublikasikan kebijakan luar negeri.¹⁰ Meskipun summit diplomacy hanya dilakukan antar kepala negara tetapi pola diplomasi ini berbeda dengan pola diplomasi personal. Dalam diplomasi personal Presiden berlaku secara unilateral tanpa saran dari seorang profesional ataupun asisten sedangkan dalam summit diplomacy presiden sebatas berdiplomasi tetapi tidak bertindak atau berpikir secara unilateral.

Sementara menurut Elmer Plischke Summit diplomacy memiliki beberapa kelebihan¹¹:

1. hubungan pribadi antar kepala negara dapat berpengaruh pada hubungan kerja sama dalam
2. lebih efisien dengan kepala negara secara langsung menjadi negosiator
3. ketika ditemui jalan buntu dapat cepat terselesaikan dengan mempertimbangkan solusi lain atau mengakomodasi solusi dari negosiator lain.

¹⁰ Plischke, Elmer, 1958. "Summit Diplomacy : Personal Diplomacy of the President of the United States", College Park: General Research Board University of Maryland, halaman. 3-122

¹¹ ibid

D.3 Public Diplomacy

Diplomasi pada umumnya dilakukan oleh negara atau pihak yang mewakilinya dengan negara lain. Tujuannya pun jelas untuk mencapai national interest yang diinginkan, ataupun menyelesaikan konflik atau persengketaan yang sedang terjadi. Cara yang dilakukan pun beragam, mulai dari menggunakan soft diplomacy seperti kebudayaan dan nilai – nilai hingga menggunakan tekanan kepada negara lain agar menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Dapat disimpulkan bahwa diplomasi memiliki unsur pokok nya adalah negosiasi, dan negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kepentingan negara, dimana semua itu dilakukan dengan cara damai dan menghindari perang. Dan aktornya adalah negara yang melakukan diplomasi ke negara lain.

Berbeda halnya dengan dengan public diplomacy, dimana public diplomacy memiliki pemahaman yaitu diplomasi sebagai usaha - usaha yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara terhadap public/masyarakat sendiri ataupun masyarakat internasional dengan harapan dapat memperbaiki citra atau mendapat citra baik.¹² Public diplomacy juga turut mempengaruhi bagaimana individu di seluruh dunia mengetahui dan memahami satu sama lain. Diplomasi ini digunakan dengan mengetahui kebutuhan pihak lain dan berusaha mewujudkannya demi mendapat citra yang diinginkan. Hubungan yang terjadi melalui public diplomacy kemudian diharapkan dapat membuat suatu komunikasi yang baik antara masyarakat antar negara agar saling bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan.

¹² Henrikson, Alan.K. 2005. dalam Definiton of Public Diplomacy, diakses dari laman, <<http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy/Definitions>>

Sementara tujuan public diplomacy menurut Mark Leonard adalah :¹³

1. Untuk meningkatkan rasa saling membutuhkan, yaitu dengan membuat negara lain saling memikirkan serta membuat citra yang baik terhadap satu negara.
2. Meningkatkan rasa respect masyarakat kepada suatu negara tertentu, sehingga mempunyai pandangan yang baik.
3. Untuk memperkuat hubungan masyarakat di suatu negara, contohnya menggunakan kerjasama bidang pendidikan, menarik minat masyarakat di suatu negara untuk berkunjung ke suatu tempat wisata, mengkonsumsi produk lokal, serta dengan cara memberikan nilai – nilai positif kepada aktor – aktor yang di kehendaki.
4. Memengaruhi pemerintah atau masyarakat untuk menanamkan modalnya di suatu negara, dan menjadikannya kolega politik.

Jika melihat tujuan yang dijelaskan Mark, maka dapat dilihat bahwa public diplomacy memerlukan sebuah komunikasi yang baik antara kedua pihak yang berdiplomasi, agar menciptakan lingkungan komunikasi yang bagus supaya nilai dan pesan yang diberikan dapat diterima tanpa adanya distorsi informasi. Dapat disimpulkan bahwa public diplomacy adalah bagaimana pihak satu dapat memahami pihak lain demi mendapatkan citra yang baik dari pihak lain.

¹³ Leonard, Mark. 2002. Public Diplomacy. The Foreign Policy Centre. London

E. Hipotesis

Dari rumusan masalah yang ada kemudian di dukung oleh kerangka konsep yang telah ditetapkan maka dapat ditarik sebuah hipotesa sebagai berikut :

Yang pertama adalah untuk mengatasi hambatan internal yang berasal dari masyarakat serta beberapa NGO seperti Greenpeace dan Walhi. pemerintah Indonesia melakukan pendekatan – pendekatan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi pembangunan serta melakukan program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat di sekitar proyek dapat tetap sejahtera.

Yang kedua untuk mengatasi hambatan eksternal yang muncul dari keraguan pemerintah jepang. Pemerintah Indonesia melakukan lobby – lobby berupa kunjungan langsung ke jepang oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun oleh presiden Joko Widodo.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi yang akan dibuat adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam hasil penelitian akan disajikan dengan metode deskriptif atau penjelasan yang memperjelas isi dari skripsi itu sendiri. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperlihatkan fakta - fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasain ini adalah berupa studi pustaka, literature – literature, jurnal , serta sumber internet yang relevan yaitu yang berasal dari website resmi pemerintah, organisasi, perusahaan maupun media massa yang sudah terpercaya keakuratanya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam BAB I akan dibahas tentang latar belakang masalah investasi pembangunan PLTU kabupaten batang, perumusan masalah, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Bidang Ekonomi

Dalam BAB II akan dibahas hubungan Indonesia dengan Jepang dalam bidang ekonomi, termasuk bagaimana sejarah Indonesia berhubungan dengan Jepang serta dinamikanya.

BAB III : Hambatan Internal dan Eksternal

Dalam BAB III akan dibahas hambatan – hambatan yang terjadi pada pembangunan PLTU di Batang, dimana akan dibagi menjadi dua yaitu hambatan yang berasal dari dalam (internal) dan hambatan yang berasal dari luar (eksternal).

BAB IV : Implementasi teori

Dalam BAB IV akan dibahas usaha - usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia agar investasi ini berhasil. dan dilakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan konsep - konsep yang sudah ada dengan melakukan pengujian demi menemukan kebenaran.

BAB V : Penutup

BAB V berisi kesimpulan dari hasil pengkajian permasalahan pada bab sebelumnya dalam rangka menjawab upaya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melancarkan investasi luar negeri di kabupaten Batang.